



**RILIS KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI  
TERKAIT EVALUASI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA  
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024 - 2025  
KE KE SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL (STPN) DI YOGYAKARTA  
TANGGAL 22 – 24 AGUSTUS 2024**

---

Komisi II DPR RI melakukan kegiatan kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk meng-evaluasi kinerja Badan Pertanahan dan Tata Ruang khususnya dalam pelaksanaan reforma agraria. Rapat kerja Komisi II DPR RI dilaksanakan di kampus Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yth. Bapak Dr. H. Syamsul Alam, dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Yogyakarta dan para Kepala Kantor BPN tingkat Kabupaten, Kementerian BPN dan ATR, juga hadir Asisten Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam sambutan Pimpinan Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa terdapat tiga persoalan pokok dalam melaksanakan reforma agraria pertama ketimpangan penguasaan tanah negara, kedua timbulnya konflik agraria yang dipicu oleh adanya tumpang tindih kebijakan distribusi lahan pada masa lalu, dan yang terakhir timbulnya krisis sosial dan ekologi di pedesaan. Tiga permasalahan ini harus menjadi perhatian serius Badan Pertanahan Nasional agar kedepan tujuan reforma agraria dapat terwujud, khususnya memastikan keadilan agraria, kesetaraan akses terhadap sumber daya agraria dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu reforma agraria juga diharapkan mampu meredistribusi tanah secara adil dan merata, menyelesaikan konflik agraria, pemberdayaan dalam meningkatkan produktivitas, perlindungan hak kepemilikan tanah, serta pengelolaan tanah yang berkelanjutan. Berdasarkan tujuan reforma agraria tersebut, Komisi II DPR RI meminta Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dibentuk oleh BPN dapat memaksimalkan kinerjanya, bersinergis dengan stakeholder terkait dalam penyelesaian permasalahan konflik agraria seperti tumpang tindih lahan, penguasaan lahan, dan lain-lain. Dengan pemerataan penguasaan tanah diharapkan penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif dapat terwujud melalui pemberdayaan masyarakat. Akses masyarakat terhadap sumber daya agraria perlu menjadi perhatian besar pemerintah untuk menatanya kembali agar masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya agraria untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional menyampaikan bahwa di DIY tidak ada Tanah Negara, berimplikasi pada keraguan dan sulitnya menentukan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di DIY, mengingat TORA adalah tanah negara atau tanah hak yang dilepaskan lebih dahulu menjadi tanah

negara. Hal ini menjadikan penataan asset TORA melalui kelembagaan GTRA difokuskan pada penyelesaian permasalahan/sengketa/konflik pertanahan. Saat ini BPN sedang menyelesaikan permasalahan tanah Tutupan Jepang Parangtritis melalui Sertifikasi Konsolidasi Tanah, Penyelesaian Status Tanah Enclave, Penyelesaian Permasalahan Tukar Menukar Tanah Desa.

Dalam rapat kerja tersebut juga membahas peningkatan kualitas dari Sekolah Tinggi Petanahan Nasional (STPN) yang merupakan perguruan tinggi di bawah BPN. Ketua STPN menyampaikan bahwa STPN saat ini berusaha meningkatkan status menjadi Politeknik dan menyiapkan lulusan terbaik dari STPN seperti jurusan juru ukur. Sejalan dengan kebutuhan pertanahan, STPN akan menyiapkan program studi yang akan disesuaikan dengan struktur kerja di BPN.

Beberapa catatan hasil rapat Komisi II DPR RI dengan BPN Provinsi Sumatera Selatan, antara lain adalah:

1. BPN Wilayah Yogyakarta perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat mengingatnya banyaknya laporan dari Ombudsman menunjukkan banyak mal administrasi yang dilakukan oleh BPN.
2. STPN perlu meng-update informasi terbaru tentang STPN, jenis program studi yang diusulkan, dan perlunya menyesuaikan program studi dengan kebutuhan pertanahan kedepan.
3. BPN perlu memperhatikan permasalahan pertanahan yang terkait dengan tanah kesultanan, dengan tetap mengambil jalan tengah antara Rakyat dan Sultan.

Kota Joga, 22 Agustus 2024,

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke D. I. Yogyakarta.